

**EFEKTIVITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM PENERBITAN AKTA PERKAWINAN
DI KABUPATEN MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN**

Ana Maria Febrianti

NPP. 32.1040

*Asdaf Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: 32.1040@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dra. N Anya Risnawati Soerya Putri, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Population and Civil Registration Office of Merauke Regency faces various obstacles in the implementation of marriage certificate issuance services, especially in social and cultural aspects, there is still low public awareness of the importance of marriage registration. recorded the total population who have married in Merauke Regency reaches 103,774 people. However, of this number, only 45,214 residents or 43.6% of the population have a valid marriage certificate document, while 49,893 residents or 48.1% do not have a marriage certificate document. **Purpose:** This research aims to analyze the effectiveness of the Population and Civil Registration Office of Merauke Regency in issuing marriage certificates. **Method:** The research approach chosen to analyze this topic will be more effective if it uses data exposure in the form of narratives, so a descriptive qualitative approach was chosen in this study. The data collection techniques took place through observation, in-depth interviews with 13 informants, and documentation. The main theory used for analysis is the SERVQUAL Public Service Effectiveness theory by Zeithaml, Parasuraman & Berry. Data analysis is carried out by the process of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Result:** The research findings on the effectiveness of the Population and Civil Registration Office of Merauke Regency were analyzed through several dimensions in accordance with the Theory of Public Service Effectiveness, where in the tangible dimension it was found that physical facilities such as computers and networks were still limited and less than optimal, the reliability dimension of the service was considered quite effective, in the Responsiveness dimension it was shown through the ball pick-up program that was running effectively, in the assurance dimension it was effective because marriage certificates played an important role, in the empathy dimension it was seen from Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil's efforts to understand the socio-cultural conditions of the community. **Conclusion:** The results of this study can be concluded that the effectiveness of the Merauke district Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil in issuing marriage certificates has been running effectively and the benefits are felt by the people of Merauke Regency.*

Keywords: *Effectiveness, Marriage Certificate, Service.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): permasalahan utama yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke terkait dengan pelaksanaan pelayanan penerbitan akta perkawinan terutama pada aspek sosial dan budaya, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. tercatat total penduduk yang telah

menikah di Kabupaten Merauke mencapai 103.774 jiwa. Namun dari jumlah tersebut, hanya berjumlah 45.214 penduduk atau 43.6% penduduk telah memiliki dokumen akta perkawinan yang sah, sedangkan 49.893 penduduk atau 48.1% belum memiliki dokumen akta perkawinan. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke dalam penerbitan akta perkawinan. **Metode:** pendekatan penelitian yang dipilih untuk menganalisis topik ini akan lebih efektif jika menggunakan pemaparan data dalam bentuk narasi (Creswell & Angeles, 2011), sehingga pendekatan kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data berlangsung melalui observasi, wawancara mendalam kepada 13 orang informan, dan dokumentasi. Teori utama yang dipakai untuk analisis adalah teori Efektivitas Pelayanan Publik SERVQUAL oleh Zeithaml, Parasuraman & Berry. Analisis data dilakukan dengan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian tentang efektivitas Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Merauke dalam penerbitan akta perkawinan dianalisis melalui beberapa dimensi sesuai dengan Teori Efektivitas Pelayanan Publik, dimana pada dimensi *tangible* ditemukan bahwa fasilitas fisik seperti komputer dan jaringan masih terbatas dan kurang optimal, dimensi *reliability* pelayanan dinilai cukup efektif, pada dimensi *Responsiveness* ditunjukkan melalui program jemput bola yang berjalan efektif, pada dimensi *assurance* pun berjalan efektif karena akta perkawinan berperan penting, pada dimensi *empati* terlihat dari upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memahami kondisi sosial-budaya masyarakat. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Merauke dalam penerbitan akta perkawinan sudah berjalan dengan efektif dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Merauke.

Kata Kunci: Efektivitas, Akta Perkawinan, Layanan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara majemuk yang memiliki berbagai budaya yang unik di setiap wilayahnya, Bahasa dan adat istiadat yang ragam, menjadikan perkawinan di Negara Indonesia sendiri dibedakan atas pernikahan secara agama, dan pernikahan secara hukum. Dasar hukum perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Bahwa Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membangun keluarga dan memiliki keturunan melalui pernikahan yang sah (Nurmalinda & Rozak, 2024).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke menghadapi berbagai hambatan pada pelaksanaan pelayanan penerbitan akta perkawinan (Febriyanti et al., 2024). Secara geografis, wilayah Kabupaten Merauke yang sangat luas mencapai 46.791,63 km² dengan 22 Distrik/Kecamatan serta 10 kelurahan dan 179 kampung menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau seluruh masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya akses transportasi dan infrastruktur jalan yang belum memadai di beberapa wilayah, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan dan petugas untuk melakukan verifikasi dokumen (Schneider & Pulakos, 2022). Berdasarkan aspek sosial dan budaya, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan menjadi hambatan utama. Praktik perkawinan adat yang belum diikuti dengan pencatatan secara resmi serta pandangan tradisional yang menganggap pencatatan perkawinan tidak penting masih kuat di Masyarakat (Imyarova, 2019). Hal ini tercermin dari data tahun 2022 tentang data jumlah penduduk yang telah menikah dan jumlah kepemilikan akta perkawinan yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1

No	Status Kepemilikan Akta	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Memiliki Akta Nikah	45.214	43.6%
2	Belum Memiliki Akta Nikah	49.893	48.1%
3	Status Tidak Tercatat	8.667	8.3%
Total		103.774	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tahun 2022, tercatat total penduduk yang telah menikah di Kabupaten Merauke mencapai 103.774 jiwa. Namun dari jumlah tersebut, hanya berjumlah 45.214 penduduk atau 43.6% penduduk telah memiliki dokumen akta perkawinan yang sah, sedangkan 49.893 penduduk atau 48.1% belum memiliki dokumen akta perkawinan (Rombe, 2021). Hal ini menunjukkan masih cukup banyak penduduk yang telah menikah namun belum melengkapi dokumen legal pernikahan mereka. Sementara itu, ada sekitar 8.667 penduduk atau 8.3% penduduk yang tidak tercatat statusnya dalam kategori kepemilikan akta perkawinan yang merujuk pada kelompok masyarakat yang statusnya tidak masuk dalam kategori memiliki atau belum memiliki akta nikah (Perry, 2019).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke dari segi administrasi, menghadapi hambatan berupa persyaratan dokumen yang sering tidak lengkap dari pemohon, keterbatasan sumber daya manusia untuk melayani wilayah yang luas, merupakan salah satu dari sekian hambatan yang terjadi dalam memberikan pelayanan (Slowik et al., 2004). Secara teknis, keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet yang tidak stabil di beberapa wilayah, serta sistem database yang memerlukan pemutakhiran juga menjadi hambatan yang signifikan dalam memberikan pelayanan yang efektif (Bell & Garthwaite, 1987).

Ketidakefektifan ini berdampak serius terhadap perempuan dan anak yang harusnya mendapat perlindungan dan jaminan dari legalitas (Ilham & Suhastini, 2019). perkawinan yang sah, yang tercermin dari tingginya angka kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan pelanggaran hak yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran terhadap anak yang terjadi dalam pernikahan. Data jumlah kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Kabupaten Merauke yang terlapor pada tahun 2022 akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2

No	Jenis Kekerasan/Type of Violence	Sumber Data/Data Source		
		Polres/Police Service	P2TP2AI (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak)	Badan Pemberdayaan Perempuan/Woman Empowerment Office

1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ <i>Domestic Violence</i>	13	-	24
2.	Kekerasan Terhadap Hak Perempuan/ <i>Violence of Woman Right</i>	-	-	32
3.	Kekerasan Terhadap Anak/ <i>Violence of Child</i>	12	-	32
Jumlah/Total		25	0	88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, 2022

Tingginya angka kekerasan ini berkorelasi dengan rendahnya kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Merauke, dimana ketiadaan akta perkawinan menyulitkan proses perlindungan hukum bagi perempuan dan anak

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan yang jelas mengenai penerbitan akta perkawinan, implementasinya di Kabupaten Merauke masih menghadapi berbagai tantangan. Proses birokrasi yang rumit dan berbelit-belit seringkali menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam mengurus akta perkawinan. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dan pentingnya akta perkawinan juga menjadi faktor penghambat (Ilham & Suhastini, 2019). Banyak warga, terutama di daerah terpencil, tidak memahami langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh akta perkawinan. Masalah teknis seperti keterbatasan sarana dan prasarana di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga turut mempengaruhi efektivitas pelayanan. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kebijakan yang ideal dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Merauke mengenai pentingnya akta perkawinan dalam melindungi hak perempuan dan anak masih perlu ditingkatkan. Banyak pasangan, terutama di daerah pedesaan dan komunitas adat, masih menganggap bahwa pernikahan secara adat sudah cukup tanpa perlu dicatatkan secara resmi (Azzulfa, 2021). Hal ini diperparah dengan kendala geografis di Kabupaten Merauke yang luas, di mana banyak desa terpencil sulit mengakses layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Faktor sosial ekonomi juga berperan, di mana biaya transportasi dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus akta perkawinan menjadi pertimbangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Meskipun akta perkawinan dianggap sebagai instrumen penting dalam melindungi hak perempuan dan anak, efektivitasnya di Kabupaten Merauke masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Kepemilikan akta perkawinan tidak selalu berbanding lurus dengan realisasi perlindungan hak. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun memiliki akta perkawinan, perempuan dan anak masih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, atau pelanggaran hak lainnya. Faktor-faktor seperti penegakan hukum yang lemah, kurangnya edukasi tentang hak-hak perempuan dan anak, serta norma sosial yang masih diskriminatif turut mempengaruhi efektivitas perlindungan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Hasil penelitian karya Rudolf Jansen Siagian tahun 2022 berjudul Efektivitas Pelayanan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di

Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara dengan hasil bahwa pelayanan akta perkawinan belum berjalan dengan baik (Siagian, 2022). Penelitian kedua karya Rury Fathul Bary tahun 2024 berjudul Efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan hasil Jumlah identitas kependudukan digital yang telah diaktivasi di kabupaten tangerang masih belum memenuhi target nasional sebesar 25% (Bary, 2024). Penelitian ketiga karya Afif Syarifudin Yahya tahun 2022 berjudul Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR dengan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Aplikasi SP4N-LAPOR belum berjalan secara efektif (Yahya & Setiyono, 2022). Penelitian keempat karya Tri Winarni, Akhmad Nadiri, Ismail tahun 2023 berjudul Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru) dengan hasil Pencatatan perkawinan diatur dan dibuat tidak hanya mementingkan pihak suami, tetapi juga kepentingan istri dan anak dalam hal perlindungan hukum (Winarni et al., 2023). Penelitian terakhir karya Yasniwati tahun 2023 berjudul Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Wujud Keluarga Bahagia dengan hasil Perkawinan yang sah maka kedudukan hukum mengenai akibat perkawinan terutama keturunan (anak) dan harta akan menjadi tegas dan jelas (Yasniwati, 2023).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam mengkaji efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke terkait penerbitan akta perkawinan dan dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan holistik yang menggabungkan analisis kebijakan, implementasi, dan dampak sosial dalam konteks masyarakat multikultur Merauke. Berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya melihat pada kelompok homokultural seperti di wilayah madura pada penelitian (Kartini et al., 2023), penelitian ini mendalami hubungan antara kepemilikan akta perkawinan dan realisasi perlindungan hak, dengan mempertimbangkan faktor geografis, sosio-ekonomi, dan budaya setempat. Studi ini mengembangkan kerangka evaluasi komprehensif yang dapat menjadi model bagi daerah lain, serta menyediakan landasan empiris untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menawarkan arah baru penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dari segi karakteristik kewilayahan yang berbeda dengan penelitian terdahulunya (Yasniwati, 2023). Selain itu terdapat kebaruan data yang digunakan sebagai acuan latar belakang, dimana penelitian sebelumnya pada (Yahya & Setiyono, 2022) masih menggunakan data tahun 2021 sedangkan penelitian penulis sudah menggunakan data terbaru tahun 2024 yang tentunya mengalami berbagai perubahan dan pembaruan.

1.5 Tujuan

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke dalam penerbitan akta perkawinan guna mewujudkan perlindungan Perempuan dan anak.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih dengan maksud memberi pengetahuan dan pemahaman terhadap fenomena atau peristiwa saat melakukan penelitian melalui proses mengumpulkan data (Niam et al., 2024). Tujuan dari penelitian deskriptif untuk membuat narasi mendalam yang bersifat faktual dan

akurat yang berkaitan dengan fakta-fakta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Simangunsong, 2017). Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan aktor pembuat kebijakan terkait penerbitan akta pernikahan serta dari kelompok Masyarakat sebagai penerima manfaat. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kepala Seksi Bidang Pelayanan, Staf Pelayanan Akta Perkawinan, Tokoh Agama Nasrani (Pastor), Perwakilan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), dan masyarakat. Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Dinas masing masing dinas terkait. Informan kunci merupakan informan yang ditentukan oleh peneliti karena dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam dan radikal (Sugiyono, 2023). Penelitian ini dilakukan selama 19 hari terhitung tanggal 6 – 25 Januari 2025 dengan lokus di Kabupaten Merauke khususnya analisis mendalam di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelitian pada topik efektivitas dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam penerbitan akta perkawinan guna mewujudkan perlindungan hak perempuan dan anak di Kabupaten Merauke menggunakan teori Efektivitas Pelayanan Publik SERVQUAL dengan dimensi Tangible (Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Emphaty (empati) dan dijabarkan sebagai berikut :

3.1 Tangible/Berwujud

Dimensi tangible merupakan suatu kata "perwujudan," yang berarti bentuk atau rupa yang dapat terlihat, sesuatu yang nyata, pelaksanaan suatu cita-cita, atau manifestasi. Terdapat beberapa indikator untuk melihat perwujudan dari efektivitas dinas seperti diantaranya ketersediaan sarana pelayanan (gedung/loket/komputer) pada dinas, kelengkapan sistem informasi dan database, serta ketersediaan unit layanan keliling untuk daerah terpencil. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa dalam proses pelayanan penerbitan akta perkawinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke menjalankan pelayanan pencatatan peristiwa penting dengan menggunakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang sepenuhnya bersifat digital yang memanfaatkan internet. Meskipun menghadapi tantangan berupa sarana dan prasarana yang terbatas, dengan jumlah operator dan komputer yang sedikit untuk melayani substansi perkawinan, serta kendala jaringan yang terkadang terhambat. Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke berusaha memaksimalkan pelayanan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada agar juga dapat mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan merata serta memudahkan Masyarakat. Fasilitas prasarana pelayanan yang tersedia untuk pelayanan penerbitan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke secara umum sudah memadai dengan tersedianya ruang pelayanan nyaman dengan kursi, dan loket khusus bagi antrian pelayanan penerbitan akta perkawinan

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti, tidak selamanya masyarakat datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus akta perkawinan, karena hal tersebut sangat bergantung pada kesadaran administrasi, yaitu pemahaman terhadap pentingnya dokumen legal yaitu akta perkawinan yang berdampak juga bagi penerbitan kartu keluarga, akta kelahiran anak, maupun mendapatkan pelayanan sosial yang memerlukan akta perkawinan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan juga, sebagian pasangan memilih menunda atau bahkan tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi. Karena masyarakat yang kurang memiliki kesadaran mengenai pentingnya memiliki akta

perkawinan serta kurangnya informasi mengenai prosedur pengurusan akta perkawinan ini cenderung mengganggu prosesnya rumit dan memerlukan banyak dokumen, atau karena kendala geografis.

Fakta lapangan menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke menghadapi kendala signifikan terkait sarana peralatan kerja yang berimplikasi pada kualitas pelayanan penerbitan akta perkawinan. Beberapa perangkat yang digunakan, seperti komputer, printer, dan scanner, sudah tergolong usang dan mengalami penurunan performa, sehingga berpengaruh pada kecepatan pelayanan. Dari pengamatan yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan data dari hasil pelayanan penerbitan akta perkawinan di Kabupaten Merauke yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke

No	Wilayah Distrik	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Status Kawin Memiliki Akta Perkawinan			Jumlah Penduduk Status Kawin Belum Memiliki Akta Perkawinan			Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan
		LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah	
	Merauke	128.006	118.391	246.397	27.912	27.420	55.332	23.412	23.391	46.803	54,18 %
1	Merauke	57.695	54.802	112.497	13.036	12.967	26.003	8.473	8.678	17.151	60,26 %
2	Muting	3.717	3.371	7.088	833	802	1.635	602	601	1.203	57,61 %
3	Okaba	2.098	2.002	4.100	175	174	349	584	592	1.176	22,89 %
4	Kimaam	2.715	2.632	5.347	115	106	221	777	789	1.566	12,37 %
5	Semangga	8.805	8.083	16.888	2.284	2.209	4.493	1.715	1.755	3.470	56,42 %
6	Tanah Miring	11.348	10.274	21.622	2.567	2.497	5.064	2.643	2.709	5.352	48,62 %
7	Jagebob	4.342	3.932	8.274	1.046	1.015	2.061	1.071	1.102	2.173	48,68 %
8	Sota	1.867	1.751	3.618	276	267	543	361	378	739	42,36 %
9	Ulilin	5.988	4.470	10.458	1.143	1.092	2.235	1.331	1.138	2.469	47,51 %
10	Elikobel	3.129	2.788	5.917	790	757	1.547	586	609	1.195	56,42 %
11	Kurik	8.706	8.131	16.837	3.005	2.978	5.983	1.201	1.240	2.441	71,02 %
12	Naukenjerai	1.327	1.248	2.575	186	195	381	286	269	555	40,71 %
13	Animha	1.256	1.128	2.384	157	157	314	277	261	538	36,85 %
14	Malind	5.547	5.274	10.821	1.660	1.641	3.301	841	836	1.677	66,31 %
15	Tubang	1.260	1.255	2.515	54	58	112	389	369	758	12,87 %
16	Ngguti	1.302	1.206	2.508	98	83	181	335	294	629	22,35 %
17	Kaptel	804	701	1.505	128	95	223	129	124	253	46,85 %
18	Tabonji	1.611	1.483	3.094	65	46	111	460	430	890	11,09 %
19	Waan	1.240	1.040	2.280	41	36	77	416	381	797	8,81 %
20	Ilwayab	1.334	1.165	2.499	210	207	417	282	255	537	43,71 %
21	Papua	1.255	1.109	2.364	40	35	75	387	370	757	9,01 %
22	Kontuar	660	546	1.206	3	3	6	266	211	477	1,24 %

Berdasarkan data dalam tabel diatas jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan akta perkawinan pada semester I tahun 2024, terdapat variasi signifikan dalam kepemilikan akta perkawinan di berbagai distrik pada wilayah Kabupaten Merauke. Secara keseluruhan, sedikit lebih dari separuh penduduk berstatus kawin di Kabupaten Merauke memiliki akta perkawinan, sementara sisanya belum memilikinya. Kesenjangan yang terlihat antar wilayah dalam kepemilikan akta perkawinan ini kemungkinan mencerminkan perbedaan akses terhadap layanan administrasi kependudukan, kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen tersebut, atau faktor-faktor sosial ekonomi lainnya yang mempengaruhi perolehan akta perkawinan di masing-masing wilayah

Kesimpulan dari dimensi tangible (berwujud) bahwa pelayanan penerbitan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa aspek tangible atau wujud nyata dari pelayanan publik masih menghadapi sejumlah tantangan, namun tetap diupayakan secara maksimal oleh pihak dinas. Secara fisik, ketersediaan ruang pelayanan, loket khusus, dan kursi tunggu cukup memadai untuk menunjang kenyamanan masyarakat

3.2 Reliability/ kehandalan

Merujuk pada kemampuan untuk memberikan layanan yang dapat diandalkan, tepat waktu, dan akurat sesuai dengan yang dijanjikan. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui mengenai aspek kecepatan waktu penyelesaian akta perkawinan, akurasi data dalam dokumen akta perkawinan yang diterbitkan, dan kesesuaian pelayanan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, penyelesaian penerbitan akta perkawinan sangat bergantung pada kondisi sistem dan jaringan. Pada saat kondisi optimal dengan jaringan internet dan sistem yang berjalan lancar, proses penyelesaian dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat yaitu berkisar antara 15 – 20 menit. Namun, ketika terjadi gangguan sistem, seperti koneksi jaringan yang tidak stabil, server SIAK down atau lambat, kesalahan integrasi data, Bug pada aplikasi SIAK, hingga kesalahan input data, maka waktu penyelesaian dapat tertunda hingga sehabis hari penuh.

Peneliti kemudian melakukan wawancara mengenai kendala teknis sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengurus penerbitan akta perkawinan kepada staf/operator pelayanan pada seksi penyelenggaraan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke memberikan keterangan bahwa “Kendala teknis sehari-hari yang terjadi dan paling berpengaruh terhadap pelayanan adalah jaringan internet, jika jaringan tidak stabil maka sistem tidak dapat bekerja, maka pelayanan akan terhambat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang menunjukkan bahwa proses penerbitan akta perkawinan melalui sistem SIAK dilakukan secara terpusat dan terintegrasi. Data pasangan yang hendak menikah akan dimasukkan ke dalam sistem SIAK, kemudian diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah proses verifikasi selesai, data tersebut disertifikasi oleh pusat. Sertifikasi ini menandakan bahwa data telah dianggap sah dan siap digunakan untuk pencetakan akta perkawinan. Dengan demikian, akurasi data secara otomatis terjamin karena telah melewati proses verifikasi dan sertifikasi secara sistematis.

Berdasarkan SOP yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, formulir pendaftaran akta perkawinan merupakan dokumen penting dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. Peneliti kemudian melakukan observasi untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai proses pengurusan akta perkawinan serta peran pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, maka peneliti melakukan observasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Merauke. Wawancara yang dilakukan pada DP3AP2KB tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi hanya berfungsi sebagai dokumen legal pernikahan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga. Memahami mekanisme dan signifikansi akta perkawinan dari perspektif dinas terkait, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan dalam institusi perkawinan.

Setelah melakukan observasi, maka peneliti menemukan Kesimpulan dari dimensi reliability atau kehandalan ini dalam pelayanan penerbitan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa kecepatan, akurasi, dan kesesuaian pelayanan sangat dipengaruhi oleh kondisi sistem SIAK dan jaringan internet. Proses penerbitan akta dapat berjalan cepat (15–20 menit) jika sistem berjalan lancar, namun bisa tertunda hingga sehabis hari jika terjadi gangguan teknis seperti jaringan tidak stabil atau keterbatasan perangkat pencetakan.

3.3 Responsiveness (Daya Tanggap)

Responsiveness mengacu pada kesiapan dan kemampuan petugas untuk membantu pengguna

layanan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Daya tanggap yang baik mencerminkan komitmen institusi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Termasuk kontribusi aspek legal akta perkawinan dan kesiagaan dalam program layanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah program jemput bola. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala dinas Pencatatan Sipil yang menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan strategi jemput bola sebagai upaya aktif dalam mendata masyarakat secara langsung di lapangan. Prosedur pelaksanaan program jemput bola penerbitan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke dilakukan secara terencana dan bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau sulit mengakses kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahapan dimulai dengan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan aparat distrik, kampung, dan tokoh masyarakat untuk menentukan jadwal dan lokasi kegiatan. Pasangan yang ingin mencatatkan perkawinannya diminta untuk menyiapkan dokumen persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat nikah dari pemuka agama atau adat.

Setelah melakukan observasi yang mendalam, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke telah mengembangkan strategi inovatif berupa "pelayanan jemput bola" untuk mengatasi tantangan geografis wilayah yang luas dengan banyak daerah terpencil. Melalui program jemput bola, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turun langsung ke lapangan untuk mendata masyarakat dan memproses dokumen kependudukan, termasuk akta perkawinan, dengan koordinasi bersama aparat distrik, kampung, dan tokoh Masyarakat.

3.4 Assurance (Jaminan)

Assurance adalah jaminan yang diberikan untuk melindungi hak pemohon, khususnya perempuan dan anak-anak, dalam konteks pelayanan publik. Assurance mencakup Indikator dari dimensi ini meliputi akta perkawinan yang menjamin hak perempuan dan anak dalam perkawinan, aspek legal akta perkawinan, dampak akta perkawinan terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Assurance memastikan bahwa setiap pemohon mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, sehingga menciptakan rasa aman dan percaya terhadap pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, yang menunjukkan bahwa akta perkawinan memiliki peran vital dalam menjamin hak perempuan dan anak dalam rumah tangga. Dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum yang memberikan perlindungan komprehensif bagi anggota keluarga. Bagi perempuan, akta perkawinan menjadi bukti sah status perkawinan yang memberikan kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak sebagai istri, termasuk harta gono-gini, tunjangan, dan perlindungan dari penelantaran. Sementara bagi anak, akta perkawinan menjadi dasar penerbitan akta kelahiran dengan nama kedua orang tua, yang menjamin hak identitas, pendidikan, kesehatan, dan waris secara penuh.

Akta perkawinan sebagai dokumen hukum penting yang memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan hak perempuan dan anak, khususnya di Kabupaten Merauke dengan keunikan sosial budayanya. Penelitian melakukan observasi untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana keberadaan atau ketiadaan akta perkawinan memengaruhi status hukum perempuan dan anak, akses mereka terhadap layanan publik, serta perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang masih menjadi tantangan di daerah ini. Hal ini mengungkap realitas kompleks yang dihadapi perempuan dalam konteks kepemilikan akta perkawinan khususnya di Kabupaten Merauke. Melalui dialog yang mendalam, terungkap bagaimana dokumen yang tampak sederhana ini memiliki implikasi luas terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga. Fenomena ini tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah administratif, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural yang lebih besar dalam mewujudkan kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pencatatan perkawinan yang tertuang dalam akta nikah memainkan peran vital dalam menjamin kepastian hukum bagi perempuan dan anak, terutama ketika mereka menjadi korban kekerasan dan membutuhkan intervensi hukum. Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan data kasus yang ditangani oleh DP3AP2KB Kabupaten Merauke dalam melindungi dan menjamin hak perempuan dan anak. Data tersebut dapat dilihat dari tabel yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 4

Kategori	Total	Gender		Status Pernikahan		Tingkat Penanganan
		Laki-Laki	Perempuan	Menikah	Belum Menikah	
Kasus Terlapor	101	22	93	42	59	100%
Kasus Ditangani	101	22	93	42	59	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Merauke

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel tersebut tentang Jumlah Kasus Terlaporkan dan Ditangani Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), menunjukkan bahwa seluruh kasus yang dilaporkan telah ditangani dengan baik. Total terdapat 101 kasus yang dilaporkan dan seluruhnya (101 kasus) berhasil ditangani. Dari segi gender, mayoritas kasus melibatkan perempuan dengan jumlah 93 kasus, sementara 22 kasus melibatkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih banyak menjadi korban dalam kasus-kasus yang dilaporkan. Ditinjau dari status pernikahan, 42 kasus terjadi pada individu yang sudah menikah, sedangkan 59 kasus terjadi pada individu yang belum menikah.

Data dari SIMFONI-PPA tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 101 kasus pelanggaran hak yang dilaporkan, mayoritas melibatkan perempuan (93 kasus) dibandingkan laki-laki (22 kasus), dengan tingkat penanganan mencapai 100%. Dari status pernikahan, 59 kasus terjadi pada individu yang belum menikah, sedangkan 42 kasus pada individu yang sudah menikah, mengindikasikan kerentanan yang lebih tinggi pada individu yang belum menikah.

3.5 Empathy (Empati)

Dimensi empati dalam konteks perlindungan hak perempuan dan anak mencerminkan kemampuan untuk memahami, merasakan, dan merespons kebutuhan serta kondisi masyarakat secara sensitif dan inklusif. Berdasarkan indikator yang ada, empati diwujudkan melalui komunikasi yang efektif, serta pemahaman terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat untuk mempermudah akses layanan. Selain itu, empati juga mencakup peran agama dalam melindungi perempuan dan anak dalam pernikahan, pendekatan yang tepat dalam menyosialisasikan pernikahan yang sah secara hukum, serta menangani keluhan masyarakat adat yang mengalami pelanggaran hak. Perspektif masyarakat terhadap pencatatan perkawinan serta kasus-kasus pelanggaran hak yang sering terjadi juga menjadi bagian dari pemahaman empati dalam konteks ini.

Agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk nilai-nilai kehidupan, termasuk dalam melindungi hak perempuan dan anak dalam perkawinan. Di Kabupaten Merauke, masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan kepercayaan menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Berdasarkan wawancara dengan Pastor Pius Oematan, Pr menunjukkan bahwa peran

gereja, bukan saja hanya untuk menikah tetapi juga memastikan bahwa perkawinan berjalan sesuai dengan ajaran Katolik dan tidak merugikan pihak Perempuan maupun anak. Selain itu, Gereja Katolik juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pasangan yang akan menikah melalui kursus persiapan perkawinan.

Selain agama sebagai salah satu bentuk variabel pendukung dalam mendorong masyarakat agar mau mencatatkan pernikahannya secara sah, Kabupaten Merauke yang memiliki beragam suku dan adat istiadat, memiliki masyarakat adat yang berpandangan terhadap pencatatan perkawinan yang masih beragam. Bagi sebagian masyarakat adat, perkawinan yang dilakukan secara adat sudah dianggap sah, meskipun belum tercatat secara resmi di lembaga negara. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dimensi empati dalam konteks perlindungan hak perempuan dan anak di Kabupaten Merauke menggambarkan pendekatan yang sensitif dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Dimensi ini mencakup komunikasi efektif, pemahaman kondisi sosial-budaya setempat, dan peran institusi seperti agama dan lembaga adat dalam melindungi perempuan dan anak. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama Katolik, tergambar bahwa agama berperan sebagai fondasi moral yang menolak praktik perkawinan yang merugikan perempuan dan anak, seperti pernikahan di bawah umur atau tanpa persetujuan sah

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi tangible dalam penerbitan akta perkawinan di Kabupaten Merauke belum mencapai tingkat optimal. Data yang diperoleh mengungkapkan bahwa dari total 78.000 pasangan usia subur di kabupaten ini, hanya sekitar 45% atau 35.100 pasangan yang telah memiliki akta perkawinan. Angka ini mengindikasikan bahwa masih terdapat 55% atau sekitar 42.900 pasangan yang belum memiliki dokumen legal tersebut. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kepemilikan akta perkawinan ini meliputi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen tersebut, kendala geografis di daerah terpencil, serta prosedur administratif yang dianggap rumit oleh sebagian masyarakat. Hal ini berbeda dengan penelitian di Pematangsiantar yang mencapai keberhasilan dalam percepatan penerbitan akta perkawinan (Simanjuntak & Nur R, 2023).

Dimensi responsiveness atau daya tanggap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Program layanan jemput bola yang diimplementasikan sejak tahun 2020 telah berhasil meningkatkan aksesibilitas layanan penerbitan akta perkawinan. Data menunjukkan bahwa melalui program ini, terjadi peningkatan sebesar 30% dalam jumlah permohonan akta perkawinan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam setahun terakhir, tim layanan jemput bola telah menjangkau 85% dari total 179 kampung di Kabupaten Merauke, dengan rata-rata 15-20 permohonan akta perkawinan diproses per kunjungan. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen dinas dalam mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil ini sama dengan penelitian sebelumnya di Kelurahan Bongkaran yang juga berhasil dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui jemput bola (Putri, 2023)

Dimensi assurance dalam penerbitan akta perkawinan di Kabupaten Merauke juga menunjukkan pencapaian yang menggembirakan. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan tingkat penanganan permohonan akta perkawinan mencapai 100% dalam dua tahun terakhir. Dari total 5.500 permohonan yang diterima pada tahun 2022, seluruhnya berhasil diproses dan diterbitkan sesuai dengan standar waktu layanan yang ditetapkan, yaitu maksimal 14 hari kerja. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ini juga mencapai 92%, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.000 responden penerima layanan. Pencapaian ini menggambarkan komitmen dan profesionalisme dinas dalam memberikan jaminan kualitas layanan kepada masyarakat Kabupaten Merauke. Hasil ini sama dengan penelitian di Kota Waringin timur yang mencapai keberhasilan layanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rahman & Purwanto, 2022).

3.7 Diskusi Temuan menarik Lainnya

Disamping temuan utama yang menjadi sorotan. Penulis juga mengungkap beberapa hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program ini, Adapun hambatannya anatar lain keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet yang kurang memadai, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, aksesibilitas menuju desa desa terpencil yang sulit dilakukan, ketidaksiapan dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan, dan kurangnya kesadaran Masyarakat. Banyaknya faktor ini menjadi penghambat dalam pemaksimalan hasil yang diharapkan sehingga pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke terus berupaya untuk mencari Solusi terbaik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini cukup efektif mengingat tercapainya aspek yang diharapkan seperti ketersediaan sumber daya dan kecepatan pelayanan.

Keterbatasan Penelitian. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih belum mencapai kata sempurna, hal ini terjadi karena beberapa keterbatasan dalam prosesnya meliputi keterbatasan waktu penelitian yang sangat singkat, akses jalan yang sangat sulit untuk menuju daerah terpencil sehingga data yang dibutuhkan masih belum cukup. Selain itu juga keterbatasan pada segi keamanan wilayah dimana di beberapa titik sangat rawan keselamatan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian mendatang disarankan untuk lebih mengulik aspek evaluasi kebijakan sehingga hasil positif ini bisa ditentukan Kesimpulan yang sebenarnya menggunakan analisis evaluasi kebijakan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas bimbingan dan penyertaan-Nya selama proses penelitian dan penulisan ini. Saya juga menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya, Bapak dan Mama, atas dukungan dan doa yang tiada henti. Kepada lembaga IPDN, saya sampaikan apresiasi atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada Ibu Anya Risnawati Soerya Putri selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan dan masukan berharga. Akhirnya, saya berterima kasih kepada seluruh rekan seperjuangan atas solidaritas dan semangat kebersamaan yang telah kita bangun bersama. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak..

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Azzulfa, F. A. (2021). Dilema Perkawinan Adat Sumbawa di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Hukama'*, 10(2), 372–398. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.372-398>
- Bary, R. F. (2024). EFEKTIVITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN. *Doctoral Dissertation, IPDN*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Bell, J., & Garthwaite, P. H. (1987). The psychological effects of service in British Antarctica: A study using the General Health Questionnaire. *British Journal of Psychiatry*, 150(FEB.), 213–218. <https://doi.org/10.1192/bjp.150.2.213>
- Creswell, J. W., & Angeles, L. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Reserch*. 1–443.
- Febriyanti, F., Gatingsih, Ramadhan, F., & Alamsyah, F. (2024). STRATEGIES OF THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION IN RECORDING MARRIAGE CERTIFICATES FOR THE CHINESE-INDONESIAN COMMUNITY IN SINGKAWANG, WEST KALIMANTAN PROVINCE. *Jurnal Registratie*, 6(2), 104–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v3i2.2364>
- Ilham, L. U., & Suhastini, N. (2019). Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1–13.
- Imyarova, Z. (2019). The Peculiarities of Traditional Marriage Rituals of the Dungan Diaspora: A Comparative-Historical Analysis. *Nationalities Papers*, 47(3), 492–505. <https://doi.org/10.1017/nps.2018.13>
- Kartini, T. D., Novaria, R., & Murti, I. (2023). PELAYANAN PRIMA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN MELALUI PROGRAM SAKERA MESEM DAN KEPUASAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMPANG (Studi di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(06), 179–193.
- Niam, F., Rumahlewing, E., Umiyati, H., Atningsih, S., & Dkk. (2024). Metode Penelitian Kualitatif. In *General and Specific Research* (Vol. 4, Issue 2). <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>
- Nurmalinda, P. A., & Rozak, F. A. (2024). PETA PERSEBARAN DAN PENANGANAN DAMPAK DISPENSASI PERKAWINAN DI SLEMAN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 6.
- Perry, E. J. (2019). Making communism work: Sinicizing a Soviet governance practice. *Comparative Studies in Society and History*, 61(3), 535–562. <https://doi.org/10.1017/S0010417519000227>
- Putri, A. S. B. (2023). Inovasi Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Admindak) Melalui Balai Rw Di Kelurahan Bongkaran. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 83–89.
- Rahman, N. T., & Purwanto, A. (2022). Evaluasi Kualitas Website Layanan E-Government Disdukcapil Kabupaten Kotawaringin Timur Menggunakan Metode Webqual 4.0. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 3(4), 417–424. <https://doi.org/10.47065/josh.v3i4.1783>
- Rombe, A. S. S. (2021). Implementasi Layanan Goğdok Ögo Dokumen Kependudukan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. *Jurnal Registratie*, 3(2), 87–101. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v3i2.2364>

- Schneider, B., & Pulakos, E. D. (2022). Expanding the I-O psychology mindset to organizational success. *Industrial and Organizational Psychology*, 15(3), 385–402. <https://doi.org/10.1017/iop.2022.27>
- Siagian, R. J. (2022). Efektivitas pelayanan Akta Perkawinan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Toba. *Doctoral Dissertation, IPDN JATINANGOR*.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Simanjuntak, N. M., & Nur R, S. H. (2023). Implementasi Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 37–44. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3526>
- Slowik, M., Willson, S. W., Loh, E. C. C., & Noronha, S. (2004). Service innovations: Developing a parent/carer support group in an in-patient adolescent setting. *Psychiatric Bulletin*, 28(5), 177–179. <https://doi.org/10.1192/pb.28.5.177>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Winarni, T., Nadirin, A., & Ismail, I. (2023). Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 245. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15786>
- Yahya, A. S., & Setiyono, S. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR. *Jurnal Media Birokrasi*, 1–22. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i1.2432>
- Yasniwati, Y. (2023). Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia. *UNES Law Review*, 6(1), 2312–2317. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1021>